



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SILFINIA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI SERTIFIKASI
3. NHK : 258999

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.930.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/123 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 890.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 93.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK / SUPRA FIT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 135.800.000

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 68.082.471

F. HARTA LAINNYA

Rp. 36.000.000

Sub Total

Rp. 2.263.382.471

III. HUTANG

Rp. 269.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.994.382.471

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.